

Democratic Values dan Toleransi Politik pada Mahasiswa Beragama Islam di Kota Makassar

Muh. Kasogi Nurdin

Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Abstract Democracy is known as the greatest political system in the world, since it stresses collective compromise from all societal elements in developing the state. One of the democracy's results is political tolerance, which is the society's tolerant-intolerant behavior towards minority group in socio-political activities. An individual acts tolerant on minority group with several factors, such as institutionalization, recognition, etc. In Indonesia context, majority group (Islam) is still acting intolerant towards most of the minority groups. Chinese-Indonesian ethnic community is one of the Indonesia's minority groups, which has received discrimination from "New Order" until "Reformation" period. This study aims to understand the effect of democratic values on political tolerance from Muslims' university students in Makassar city, with Chinese-Indonesian ethnic community as the minority group which becomes the study's object. The study's method is quantitative, by using democratic values' measuring instrument from Saiful Mujani (2019), and political tolerance's measurement from Jeremy Menchik (2016). The result shows positive effect from democratic values on political tolerance, which presents Muslims' university students in Makassar city to act tolerant on Chinese-Indonesian ethnic community.

Keywords: Political Tolerance, Democratic Values, Chinese-Indonesian Ethnic Community

Corresponding author:
Muh. Kasogi Nurdin,
kasoginurdin@yahoo.com

Article history
Received: 12 December, 2021
Revised: 31 March, 2022
Accepted: 21 May, 2022

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International
License.

1. Pendahuluan

Demokrasi dapat dipahami sebagai proses penyempurnaan dan pensejahteraan negara. Demokrasi menekankan kompromi sebagai proses solidifikasi nilai dan perspektif bersama. Kompromi berfungsi agar penentuan kehendak dapat dikembangkan secara setara di antara pemangku jabatan dan masyarakat awam. Kompromi berperan dalam menyelaraskan kepentingan kelompok mayoritas dan minoritas, agar proses demokrasi dapat berjalan beriringan di antara kedua kelompok (Faturrahman, 2018).

Di Indonesia, perkembangan demokrasi mengalami perkembangan secara positif maupun negatif dari masa Orde Lama hingga Reformasi. Perkembangan demokrasi juga tidak dapat terlepas dari perjuangan mahasiswa atau pemuda sebagai salah satu aktor utama dalam mengembangkan tatanan demokrasi yang kondusif. Contoh utama peran

pemuda dan mahasiswa dalam menegakkan tatanan demokrasi di Indonesia adalah seperti Sumpah Pemuda 1928, pergerakan kemerdekaan 1945, pendorong pengesahan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) 1966 dalam membubarkan Partai Komunis Indonesia, serta Reformasi 1998. Peristiwa tersebut menunjukkan peran pemuda dan mahasiswa dalam mengoreksi tatanan demokrasi yang mengalami ancaman dari pihak tertentu. Peran mahasiswa di dalam peristiwa tersebut melahirkan istilah “agent of change” atau agen perubahan, sebagai bukti nyata usaha mahasiswa dalam mempertahankan proses perkembangan demokrasi negara demi kepentingan bersama.

Namun, kenyataan perkembangan demokrasi pada Masa Reformasi tidak berjalan sesuai dengan harapan. Data dari Badan Pusat Statistik didukung oleh Peringkat Kualitas Demokrasi dari Economist Intelligence Unit (EIU) yang memberikan skor kepada Indonesia sebesar 6,48 dan masuk ke kategori *flawed democracy* (Noor, 2020). Walaupun Indonesia berada pada peringkat ketiga dalam peringkat EIU untuk wilayah ASEAN, perkembangan demokrasi Indonesia masih menjadi permasalahan utama bagi negara dan masyarakat. Bukti riil dari hasil statistik tersebut dapat diamati melalui rangkaian peristiwa perihal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), revisi Undang-Undang KUHP, serta pengesahan omnibus law pada tahun 2019, yang mendorong gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia untuk melakukan demonstrasi besar-besaran dalam menolak pengesahan undang-undang tersebut. Pandemi COVID-19 juga memperparah kesenjangan demokrasi Indonesia, dengan limitasi pergerakan manusia menjadi permasalahan utama agar masyarakat melakukan konsolidasi bersama dalam melaksanakan kegiatan dalam mengkritisi kebijakan pemerintah.

Dalam konteks perkembangan demokrasi di Kota Makassar sebagai lokasi penelitian, peneliti dapat mengatakan bahwa perkembangan demokrasi belum efisien. Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari LOGOV Celebes menunjukkan bahwa skor demokrasi di Provinsi Sulawesi Selatan menurun sebesar 0.30 dari 70.88% (2018) menjadi 70.55% (2019). Indikator yang menurun adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi, pemilihan umum yang bebas dan adil, serta peran DPRD. Hasil skor tersebut menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan ke dalam kategori demokrasi “sedang” (Rizaldi, 2021). Oleh karena itu, toleransi perlu diimplementasikan oleh seluruh kalangan, terutama mahasiswa, agar tatanan demokrasi dapat berkembang secara berkelanjutan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti sifat atau sikap toleran, atau penyimpangan yang masih dapat diterima. Toleransi menjadi komponen penting untuk demokrasi yang berfungsi agar dunia berada di dalam kondisi yang stabil. Toleransi menjadi penting karena menyentuh beberapa aspek kehidupan masyarakat dalam bersikap toleran terhadap sesama (Hjerm, dkk, 2019). Toleransi politik sendiri dapat dipahami sebagai “kemampuan dalam memperluas kebebasan sipil kepada kelompok dan/atau individu yang tidak disukai atau disetujui” (Eisenstein, Clark, & Jensen, 2017). Secara garis besar, toleransi politik mendorong individu untuk menghargai eksistensi atau kegiatan yang dilakukan oleh kelompok “yang tidak disukai” atau minoritas dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Dinamika toleransi Indonesia memiliki perkembangan yang insignifikan terkait perspektif kelompok masyarakat Muslim, sebagai kelompok mayoritas, terhadap kelompok minoritas. Berdasarkan data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang

melakukan penelitian terhadap respon masyarakat terhadap kondisi intoleransi dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo pada September 2019, didapatkan hasil bahwa sebanyak 59,1% responden menyatakan masyarakat Muslim bersikap intoleran jika (seandainya) non-Muslim menjadi presiden (Novellino, 2019). Penelitian Menchik dan Pepinsky (2018) juga memperlihatkan sikap intoleran masyarakat Muslim Indonesia terhadap kelompok masyarakat Kristen sebagai minoritas melalui penelitian.

Penulis memiliki ketertarikan dalam meneliti hubungan nilai demokratis dengan toleransi politik, agar mengetahui seberapa jauh masyarakat memperluas hak kebebasan sipil dan demokratis terhadap kelompok minoritas di Indonesia. Aspek idealitas toleransi politik menekankan bahwa toleransi diperlukan agar menjaga kelestarian dan keharmonisan di antara spektrum kelompok masyarakat. Aspek kenyataan toleransi politik menekankan bahwa toleransi tidak dapat mengaplikasikan prinsip ketidakterbatasan, karena prinsip *prejudice* dari kelompok yang tidak disukai dapat melukai perkembangan demokrasi di dalam negara. Urgensi penelitian dalam menentukan realisasi aspek idealitas dan kenyataan diperlukan dalam mengetahui kondisi toleransi politik empirik dari masyarakat Indonesia, dan lebih spesifik terhadap mahasiswa beragama Islam di Kota Makassar.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Toleransi Politik

Toleransi politik adalah keinginan untuk memperbolehkan seseorang untuk melaksanakan kegiatan politik yang berfokus terhadap aktivitas di luar definisi “sah” (*Legitimate*) (Lawrence, 1978). Maksud aktivitas di luar definisi sah adalah kegiatan yang bersifat “membahayakan” dan “minoritas”. Konteks toleransi politik adalah mendorong individu untuk mentolerir kegiatan yang dianggap berbahaya oleh masyarakat awam. Toleransi politik memperbolehkan setiap individu untuk mendapatkan kebebasan politik yang terbuka demi perkembangan perbedaan politik di antara masyarakat (Yudistira, 2011).

Pengimplementasian sikap toleransi politik terhadap kelompok “yang berbahaya” memiliki batasan yang dipahami oleh masyarakat awam. Penelitian terdahulu menekankan bahwa toleransi muncul berdasarkan kondisi dan diamati melalui makna kebebasan sipil bagi keberuntungan individu dan masyarakat (Lawrence, 1976). Toleransi politik dapat dilakukan jika individu telah memiliki rasa *prejudice* terhadap kelompok masyarakat minoritas. Sikap *prejudice* muncul ketika individu tidak menyukai suatu objek ataupun subjek. Individu harus memiliki sikap *prejudice* untuk mengembangkan sikap toleran, agar kesabaran (*Forebearance*) dapat terbangun dalam mempersiapkan sikap toleran terhadap kelompok tersebut.

Dalam kondisi tertentu, terdapat masyarakat yang tidak ingin memperlihatkan sikap *prejudice* karena memiliki rasa tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati eksistensi dari kelompok minoritas di dalam lingkungan. Namun, jika individu tidak memperlihatkan sikap *prejudice* terhadap kelompok minoritas, maka individu mendapatkan tekanan sosial yang menghasilkan kebiasaan terhadap kelompok. Kebiasaan sikap *unprejudiced* dapat mengalahkannya serta over-optimis terhadap toleransi. Orientasi negatif yang dimiliki oleh individu dapat diubah menjadi sikap penerimaan terhadap kelompok, yang dapat mengontrol sikap *prejudice* untuk mentolerir kelompok minoritas.

Penerimaan kelompok minoritas dapat dikatakan sebagai *absence of prejudice* (Brown-Iannuzzi, Najle, & Gervais, 2018).

2.1.1 Toleransi Politik Komunal

Konsep toleransi komunal dikembangkan oleh Jeremy Menchik, sebagai sintesis bagi literatur toleransi politik yang dinilai hanya berorientasi terhadap kondisi masyarakat liberal-sekuler. Toleransi politik komunal adalah bentuk toleransi politik yang menekankan kesepakatan bersama terhadap suatu kondisi yang mempertanyakan sikap toleransi masyarakat, melalui proses pluralisme legal dan pedoman *godly nationalism*. Konsep toleransi komunal berkembang melalui interaksi organisasi Islam, sebagai kelompok mayoritas, dengan negara Indonesia, yang berfokus terhadap organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Toleransi komunal menekankan interaksi agama dan politik yang dinamis dalam membangun sikap toleran masyarakat terhadap kelompok minoritas (Menchik, 2016).

Toleransi politik komunal terbentuk melalui dua proses, yakni proses pluralisme legal dan pedoman *godly nationalism*. Pluralisme legal adalah proses pengembangan kondisi masyarakat plural yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Pluralisme legal, dalam artian toleransi komunal, adalah bukan uni dan sekuler. *Godly nationalism* adalah bentuk nasionalisme yang dipercayai oleh masyarakat awam untuk mengorganisir kepercayaan dan agama melalui manajemen negara. *Godly nationalism* menekankan kepercayaan terhadap Tuhan yang bersifat agamis eksklusif dan asertif. *Godly nationalism* diorganisir oleh negara melalui kesepakatan proses pluralisme legal, agar kondisi toleransi masyarakat (Indonesia) dapat mengikuti kaidah formal dan informal oleh negara (Menchik, 2016).

Pengintegrasian konsep pluralisme legal dan *godly nationalism* bertujuan dalam menggambarkan toleransi politik masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Konsep toleransi komunal berkembang melalui interaksi organisasi Islam, sebagai kelompok mayoritas, dengan negara Indonesia, yang berfokus terhadap organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam. Toleransi komunal menekankan interaksi agama dan politik yang dinamis dalam membangun sikap toleran masyarakat terhadap kelompok minoritas.

Sikap *prejudice* masyarakat, yang terbentuk berdasarkan interaksi dengan kelompok minoritas, berkembang melalui marginalisasi politik dan intoleransi negara terhadap kelompok masyarakat minoritas. Contoh marginalisasi politik dan intoleransi negara terhadap kelompok masyarakat minoritas adalah kelompok kepercayaan Ahmadiyah. Dalam segi historikal, kelompok kepercayaan Ahmadiyah telah mengalami berbagai macam persekusi dari masyarakat Indonesia, karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang dipercaya. Pengecualian Ahmadiyah memperlihatkan bahwa pluralisme dapat berkembang dalam batasan yang disetujui oleh semua elemen, melalui prosedur hukum tetap.

Toleransi komunal menekankan empat poin utama dalam mengembangkan sikap toleran terhadap kelompok masyarakat minoritas, yakni (1) hak komunal, (2) dukungan terhadap *self-governance* komunal melalui pluralisme legal, (3) pemisahan aktivitas sosial dan agama, dan (4) kepentingan kepercayaan dibandingkan dengan nilai lain. Pengimplementasian empat poin utama dikembangkan melalui institusi formal dan

informal dalam mendukung perkembangan demokrasi Indonesia (dan bukan demokrasi sekuler). Hak komunal berarti pilihan masyarakat secara umum, dan bukan pilihan individual, dalam mendapatkan hak berkewarganegaraan. Hak komunal tidak menekankan kebebasan tidak terbatas, karena aktivitas masyarakat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga, toleransi komunal menekankan toleransi yang terbatas (Menchik, 2016).

2.1.2 Kelompok Minoritas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minoritas diartikan sebagai golongan sosial yang memiliki jumlah kecil dibandingkan dengan golongan lain di dalam suatu masyarakat. Indikasi kelompok minoritas adalah golongan yang diberlakukan secara diskriminatif karena memiliki nilai yang berbeda dengan kelompok mayoritas. Kelompok minoritas berarti kelompok yang memiliki jumlah anggota masyarakat yang sedikit dan memiliki perbedaan nilai, praktik, dan kepercayaan dari kelompok mayoritas atau dominan. Kelompok minoritas menjadi objek penelitian dalam mengetahui pengaruh democratic values terhadap toleransi politik.

Dalam sejarah literatur toleransi politik, terdapat tiga kelompok minoritas yang dijadikan sebagai objek penelitian dalam mengetahui tingkat toleransi politik masyarakat. Penggunaan kelompok minoritas sebagai objek penelitian digunakan oleh Samuel Stouffer pada tahun 1955 yang termasuk ke dalam bagian dari General Social Survey. Samuel Stouffer menetapkan kelompok masyarakat Amerika Serikat yang komunis, sosialis, dan ateis sebagai kelompok minoritas pada penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok masyarakat Amerika Serikat tidak mentolerir kelompok masyarakat komunis, disebabkan dinamika Perang Dingin yang menkontestasikan perlawanan ideologi kapitalisme dari Amerika Serikat dan komunisme dari Uni Soviet.

Penelitian terkini mengenai toleransi politik menggunakan kelompok minoritas varian yang dihasilkan dari interaksi dan sikap negara serta masyarakat dalam membentuk sikap toleran-intoleran terhadap kelompok minoritas tersebut. Penelitian Anna Boch (2020) menggunakan data dari General Social Survey (1996-2018) dan menetapkan kelompok minoritas seperti individu rasis, muslim ekstrimis, militeris, anti-agama, komunis, dan homoseksual, sebagai objek penelitian. Pemilihan kelompok minoritas dilakukan berdasarkan pembaharuan yang dilakukan oleh General Social Survey, untuk mengetahui perkembangan kelompok minoritas terbaru di lingkungan masyarakat.

Penelitian toleransi politik Indonesia memiliki perbedaan dari segi kelompok minoritas sebagai objek penelitian dibandingkan dengan peneliti di negara liberal-sekuler, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa. Penelitian Jeremy Menchik (2016) menetapkan empat kelompok minoritas Indonesia, yakni kelompok masyarakat Kristen, Hindu, Ahmadiyah, dan Komunis. Keempat kelompok masyarakat minoritas ditempatkan ke dalam kondisi tertentu dan dijadikan aitem penelitian. Fungsi penempatan kelompok masyarakat minoritas di dalam aitem penelitian adalah dalam mengetahui tingkat toleransi responden terhadap kelompok minoritas. Peneliti menanyakan respon dari subjek yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat mayoritas (Islam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden (Elit Muslim) mentolerir kelompok minoritas berdasarkan kondisi sosial yang berkembang, sehingga sikap toleran terhadap kelompok minoritas bersifat dinamis.

Peneliti menetapkan kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia sebagai objek penelitian, karena belum ada penelitian terdahulu yang menetapkan kelompok masyarakat etnis Cina-Indonesia sebagai objek penelitian. Masyarakat etnis Cina-Indonesia merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sering mengalami diskriminasi dari kelompok masyarakat mayoritas, disebabkan permasalahan historis yang mengembangkan perasaan intoleran terhadap masyarakat etnis Cina-Indonesia. Sikap diskriminatif terhadap masyarakat etnis Cina-Indonesia menjadi alasan peneliti memilih kelompok masyarakat tersebut sebagai objek penelitian.

Eskalasi kebencian masyarakat mayoritas Indonesia terhadap masyarakat beretnis Cina-Indonesia terjadi ketika perkembangan ekonomi Indonesia mulai menurun pada tahun 1990-an. Relasi pengusaha beretnis Cina-Indonesia dengan “oligarki” dijadikan sebagai justifikasi untuk mempersekusi masyarakat beretnis Cina-Indonesia melalui beberapa konflik berdarah yang menghasilkan korban jiwa. Konflik berdarah yang menempatkan masyarakat beretnis Cina-Indonesia sebagai korban adalah konflik di Medan (1994), Tasikmalaya (1996), Situbondo (1997), dan Makassar (1997). Krisis Ekonomi Indonesia menjadi pendorong besar bagi masyarakat mayoritas Indonesia untuk melakukan persekusi lebih jauh terhadap masyarakat etnis Cina-Indonesia. Krisis Ekonomi 1998 menghasilkan Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, yang dikatakan sebagai konflik persekusi terburuk terhadap kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia dalam sejarah negara Indonesia.

Peredaman intoleransi dan sikap diskriminatif terhadap masyarakat beretnis Cina-Indonesia dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Presiden Gus Dur mencabut Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1967 dan mengganti keputusan tersebut dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 Tentang Izin Kaum Minoritas Etnis Cina dalam Perayaan Hari-Hari Raya dan Tarian Naga di Tempat-Tempat Umum (Said, 2019). Penetapan keputusan tersebut menandakan rekognisi masyarakat etnis Cina-Indonesia oleh negara, dan menetapkan agama Konghucu sebagai agama yang diakui oleh negara. Namun, efek konflik dan persekusi terhadap masyarakat beretnis Cina-Indonesia berkembang hingga sekarang, dengan sentimen anti-Cina hadir ketika Presiden Joko Widodo berkuasa dikarenakan relasi Pemerintah Indonesia yang kuat dengan Pemerintah Republik Rakyat Cina. Perkembangan sikap intoleransi terhadap masyarakat beretnis Cina-Indonesia menjadi alasan peneliti untuk menetapkan kelompok masyarakat tersebut sebagai objek penelitian.

2.2 Democratic Values

Nilai demokratis (*Democratic values*) adalah nilai yang dipercaya dan diimplementasikan oleh masyarakat dan pemerintah dengan manfaat agar proses demokrasi berjalan sesuai dengan harapan. Nilai demokratis berhubungan dengan hak dan kewajiban masyarakat yang perlu dipenuhi oleh antar masyarakat dan dari pemerintah. Nilai demokratis memiliki hubungan di antara masyarakat dengan komitmen terhadap norma demokratis, melalui prinsip abstrak yang diimplementasikan secara praktis. Prinsip abstrak menggambarkan kondisi dinamis dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip abstrak menjadi parameter performa nilai demokratis berkembang, karena masyarakat selalu dihadapkan dengan kondisi dinamis yang dapat memberikan tantangan terhadap komitmen individu dengan nilai demokratis yang dimiliki.

Nilai demokratis tercerminkan melalui praktik demokratis yang dapat menjunjung tinggi kebebasan individu. Kebebasan dinilai menjadi esensi utama demokrasi yang menekankan kebebasan sebagai hak bagi setiap manusia untuk dimiliki. Konsep kebebasan dalam demokrasi dilakukan agar demokratisasi masyarakat dapat diraih. Contoh praktik pengimplementasian nilai demokratis adalah kebebasan berpendapat, hak minoritas, kesetaraan, kebebasan meliputi, dan lain-lain. Jika praktik pengimplementasian nilai demokratis dapat dilaksanakan, maka individu terkait memiliki nilai demokratis yang baik.

3. Metodologi Penelitian

Paradigma penelitian adalah paradigma positivistic yang menempatkan realita sosial sebagai sesuatu yang bersifat empirik dan dapat diobservasi secara nyata (Irwan, 2018). Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan permasalahan utama yang dikaji secara teoritis, dan dilakukan pengumpulan data dalam menguji permasalahan yang telah diubah menjadi sebuah hipotesis (Santoso, 2007).

3.1 Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian adalah tiga universitas di Kota Makassar, yakni Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia. Populasi penelitian adalah mahasiswa Kota Makassar di Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Muslim Indonesia. Untuk mengetahui jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan Rumus Slovin, yakni sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2} \quad (\text{pers.1})$$

Deskripsi:

n : Besaran sampel

N : Besaran populasi

E : Nilai kritis (Batas ketelitian) (10%)

Dengan menggunakan Rumus Slovin, maka besaran sampel penelitian adalah:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\ n &= \frac{99.232}{1 + 99.232(0.1)^2} \\ n &= \frac{99.232}{1 + 992,23} \\ n &= \frac{99.232}{993,23} = 99,9 \text{ (Dibulatkan menjadi 100)} \end{aligned}$$

Hasil Rumus Slovin menunjukkan bahwa besaran sampel penelitian adalah 100 responden. Penelitian menggunakan teknik *simple random sampling*, yakni teknik sampling yang dilakukan dengan mengambil responden dari suatu populasi secara acak berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh peneliti (Priyono, 2008).

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian menggunakan kuisisioner dalam mengumpulkan data penelitian. Kuisisioner adalah rangkaian pertanyaan yang ditetapkan oleh peneliti berdasarkan indikator teoritis dengan tujuan untuk mengumpulkan data penelitian. Kuisisioner penelitian menggunakan kuisisioner pilihan untuk memudahkan pengumpulan data (Santoso, 2007). Alat ukur *democratic values* dan toleransi politik menggunakan 5-poin Skala Likert dengan pembagian, yakni “Sangat Setuju” (SS), “Setuju” (S), “Netral” (N), “Tidak Setuju” (TS), dan “Sangat Tidak Setuju” (STS). Poin alat ukur memiliki dua perbedaan terkait dengan orientasi pernyataan aitem, yakni *favorable* dan *unfavorable*. Aitem *favorable* memiliki orientasi pernyataan positif, sehingga penilaian “Sangat Setuju” memiliki 5 poin dan “Sangat Tidak Setuju” memiliki 1 poin. Aitem *unfavorable* memiliki orientasi pernyataan negatif, sehingga penilaian “Sangat Setuju” memiliki 1 poin dan “Sangat Tidak Setuju” memiliki 5 poin.

Alat ukur *democratic values* yang digunakan di dalam penelitian adalah dari Saiful Mujani (2019) yang memiliki 8 aitem. Alat ukur *democratic values* dari Saiful Mujani menggunakan 5-poin Skala Likert, dengan skor 1 sebagai sangat tidak setuju hingga skor 5 sebagai sangat setuju. Skor tinggi menandakan individu yang memiliki *democratic values* yang tinggi. Indikator alat ukur adalah kebebasan demokratis, kesetaraan demokratis, dan relasi dengan pemerintah.

Alat ukur toleransi politik yang digunakan di dalam penelitian adalah dari Jeremy Menchik (2016) yang memiliki 16 aitem. Alat ukur toleransi politik dari Jeremy Menchik menggunakan 5-poin Skala Likert, dengan skor 1 sebagai sangat tidak setuju hingga skor 5 sebagai sangat setuju. Indikator alat ukur adalah berpidato, rekognisi, representasi, pendidikan, dan penyembahan. Seluruh aitem pada alat ukur toleransi politik dari Jeremy Menchik adalah *favorable*, sehingga skor tinggi menandakan toleransi politik yang tinggi.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian adalah teknik analisis deskriptif, yakni bentuk teknik penelitian yang mendeskripsikan fenomena utama dalam penelitian (Sugiyono, 2008). Penelitian menggunakan uji analisis regresi linear sederhana dalam menganalisis data yang didapatkan di lapangan. Uji analisis regresi linear sederhana adalah pengukuran statistik yang menguji hubungan antara sebuah variabel independen dengan variabel dependen (Priyono, 2008). Analisis data perlu melakukan uji asumsi klasik, sebelum melakukan uji asumsi regresi linear sederhana. Uji asumsi klasik adalah pengujian kebenaran data dari asumsi yang telah dibuat oleh penelitian, dengan menggunakan alat statistik. Uji asumsi klasik menggunakan bantuan dari *SPSS Statistics 25*. Uji asumsi klasik memiliki empat macam pengujian, yakni:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian analisis data dalam mengetahui normalitas distribusi variabel independen dan dependen (Janie, 2012). Uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dalam mengetahui normalitas distribusi data. Uji normalitas menetapkan bahwa nilai signifikansi sebesar $> 0,05$ adalah memiliki normalitas distribusi yang baik. Nilai signifikansi $< 0,05$ adalah memiliki normalitas distribusi yang tidak baik.

2. Uji Linearitas

Uji linearitas adalah pengujian analisis data dalam mengetahui hubungan linear antara variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2008). Uji linearitas menetapkan bahwa nilai signifikansi sebesar $> 0,05$ adalah terdapat hubungan linear antara variabel independen dan dependen. Nilai signifikansi $< 0,05$ adalah tidak terdapat hubungan linear antara variabel independen dan dependen.

3. Uji Heteroskedastisitas

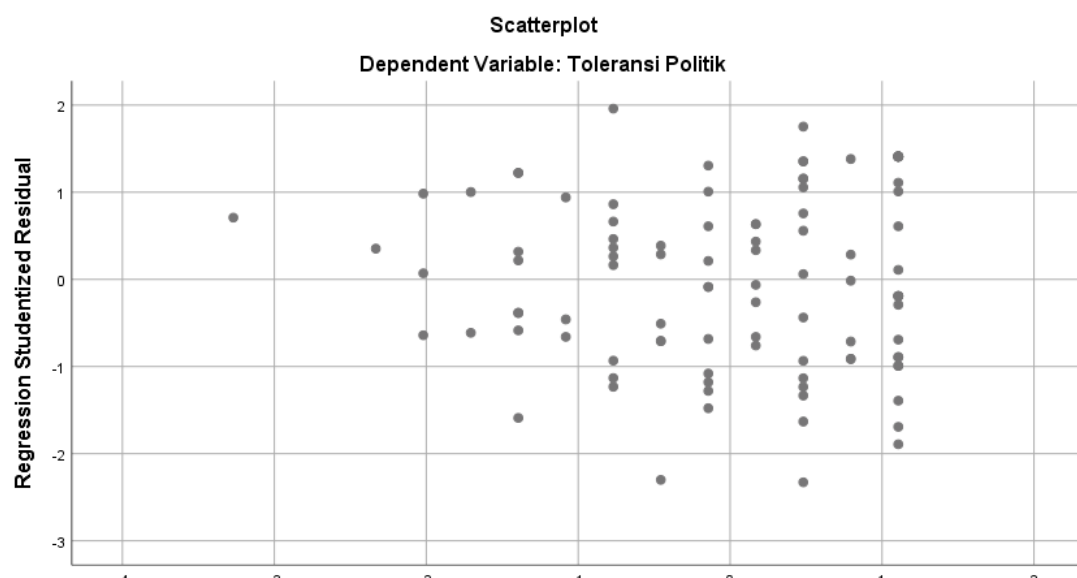
Uji heteroskedastisitas adalah pengujian analisis data dalam mengetahui varian dari data residual penelitian. Uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *Scatter Plot* dengan nilai prediksi variabel ZPRED dan residual SRESID dalam mengetahui heteroskedastisitas distribusi data. Data penelitian dinyatakan baik jika terjadi homoskedastisitas dan bukan heteroskedastisitas. Data penelitian dinyatakan tidak heteroskedastisitas, jika grafik menunjukkan pola yang tidak jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y.

4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis adalah pengujian analisis data dalam mengetahui kebenaran hipotesis yang telah dibuat oleh penelitian. Penelitian menggunakan dua macam uji hipotesis, yakni uji koefisien determinasi dan uji F. Uji koefisien determinasi adalah pengujian hipotesis penelitian dalam mengetahui besaran keragaman model regresi penelitian. Koefisien determinasi (R^2) bernilai 0 sampai dengan 1. Nilai R^2 yang besar (Mendekati 1) berarti bahwa model regresi adalah baik, dan nilai R^2 yang kecil (Mendekati 0) berarti bahwa model regresi adalah tidak baik. Uji F adalah pengujian hipotesis penelitian dalam mengetahui besaran pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Nilai signifikansi ditetapkan dalam melakukan uji F, yakni sebesar 5%. Uji F menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ serta nilai signifikansi adalah $< 5\%$, yakni terdapat signifikansi antara variabel independen dan dependen.

3. Hasil Penelitian

Dalam uji normalitas, variabel *democratic values* dan toleransi politik mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,178. Aturan uji normalitas adalah variabel memiliki distribusi yang normal jika nilai signifikansi adalah sebesar $> 0,05$. Kedua variabel memiliki



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

distribusi yang normal dikarenakan $0,178 > 0,05$. Uji linearitas antara kedua variabel menunjukkan hasil sebesar $0,967$, yakni memiliki hubungan linear. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan pola yang tidak teratur, serta titik-titik yang terletak di atas dan di bawah angka 0 dan 1. Gambar di bawah menunjukkan bahwa data penelitian tidak mengalami heteroskedastisitas.

Penelitian menggunakan analisis regresi linear sederhana dalam mengetahui hubungan antara *democratic values* dan toleransi politik. Rumus analisis regresi linear sederhana, adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b.X \quad (\text{pers.2})$$

Deskripsi:

- Y : Variabel dependen
- a : Nilai konstanta
- b : Nilai koefisien regresi
- X : Variabel independen

Nilai konstanta dan koefisien regresi dapat diamati di kolom B pada bagian *Unstandardized Coefficients*. Nilai konstanta adalah sebesar $-4,494$ dan nilai koefisien regresi adalah sebesar $1,760$. Jika kedua nilai dimasukkan ke dalam rumus, maka hasil penghitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = (-4,493) + 1,760 X$$

Hasil perumusan menunjukkan bahwa nilai konstan dari toleransi politik adalah sebesar $-4,493$, jika tidak ada influensi dari *democratic values*. Nilai koefisien regresi sebesar $1,760$ menunjukkan bahwa toleransi politik meningkat sebesar $1,760$ terhadap satu unit *democratic values*. Aturan analisis regresi linear sederhana menyatakan bahwa hubungan variabel independen dan dependen adalah positif jika nilai koefisien regresi adalah positif dan nilai signifikansi adalah $< 0,05$. Nilai koefisien regresi adalah $1,760$, yakni positif, dan nilai signifikansi sebesar $0,000$, yakni $< 0,05$. Kedua aturan telah terpenuhi, sehingga pengaruh *democratic values* terhadap toleransi politik adalah positif.

Uji hipotesis memiliki dua macam uji, yakni uji koefisien determinasi dan uji F.. Aturan uji koefisien determinasi (R^2) menyatakan bahwa model regresi baik jika nilai R^2 mendekati 1, dan model regresi tidak baik jika nilai R^2 mendekati 0 kecil. Nilai koefisien determinasi yang didapatkan adalah sebesar $0,239$. Angka *R Square* diubah menjadi persen dalam mengetahui presentase pengaruh variabel, sehingga pengaruh *democratic values* terhadap toleransi politik adalah sebesar $23,9\%$. Sisa nilai sebesar $76,1\%$ adalah presentase pengaruh variabel lain terhadap toleransi politik. Nilai koefisien determinasi sebesar $23,9\%$ menandakan bahwa pengaruh *democratic values* terhadap toleransi politik adalah kurang kuat.

Aturan uji F menyatakan bahwa menunjukkan bahwa H_1 diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi adalah $< 5\%$, sedangkan H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai signifikansi adalah $> 5\%$. Nilai F_{hitung} yang didapatkan adalah sebesar $30,714$. Nilai F_{tabel} didapatkan melalui tabel presentase distribusi F untuk nilai signifikan 5% , dengan menentukan derajat bebas 1 dan 2 (*Degree of freedom; df*). Penghitungan df_1 adalah $k - 1$

dan penghitungan df_2 adalah $n - k$, dengan “k” sebagai jumlah variabel (Independen dan dependen) serta “n” sebagai jumlah sampel. Penghitungan dilakukan sebagai berikut:

$$df_1 = k - 1 = 2 - 1 = 1$$

$$df_2 = n - k = 100 - 2 = 98$$

Nilai df_1 dan df_2 adalah sebesar 1 dan 98. Tabel presentase distribusi F untuk nilai signifikan 5% digunakan dengan mengamati kolom df_1 dan baris df_2 , dan didapatkan hasil bahwa F_{tabel} adalah sebesar 3,94. Hipotesis dinyatakan positif jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi adalah $< 5\%$. Penelitian menghasilkan hipotesis positif (H_1) dikarenakan $30,714 > 3,94$ untuk nilai F dan $0,000 < 0,05$ untuk nilai signifikansi.

4. Pembahasan

Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari *democratic values* terhadap toleransi politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa beragama Islam di Kota Makassar memiliki sikap demokratis dan toleransi politik yang tinggi terhadap kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia. Hasil penelitian juga menemukan beberapa fakta terhadap sikap demokratis dan toleransi politik dari mahasiswa beragama Islam di Kota Makassar terhadap kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia.

Mahasiswa beragama Islam di Kota Makassar memahami *democratic values* secara positif. Mahasiswa merasa bahwa kebebasan demokratis menjadi indikator utama bagi suatu negara dapat mengimplementasikan nilai demokrasi dengan adil. Kebebasan demokratis tersebut adalah kebebasan berkespresi, memilih agama, memahami dan menginterpretasikan prinsip keagamaan, serta berkumpul dan berasosiasi. Mahasiswa juga mendukung kesetaraan hukum serta hak warga negara untuk terlibat dalam urusan pemerintahan, seperti hak mengikuti dan memilih di dalam pemilihan umum.

Mahasiswa beragama Islam di Kota Makassar juga memiliki sikap toleransi politik yang tinggi, namun terdapat beberapa kondisi yang dapat menurunkan toleransi mahasiswa. Contoh kondisi tersebut adalah dalam konteks berpidato, dengan tingkat toleransi mahasiswa menurun jika seandainya kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia berdemonstrasi terhadap topik “sensitif”, seperti undang-undang berorientasi ke-Islam-an. Toleransi politik mahasiswa juga menurun ketika masyarakat beretnis Cina-Indonesia menjadi representasi pemerintah dan membangun gereja atau klenteng di kota yang didominasi oleh kelompok mayoritas (Islam).

Dalam konteks penelitian, Kota Banda Aceh menjadi kota yang didominasi oleh kelompok mayoritas (Islam) lebih banyak dibandingkan dengan Kota Makassar, Jakarta, dan Manado. Sehingga, toleransi politik mahasiswa menurun ketika kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia menjadi representasi pemerintah dan membangun gereja atau klenteng di Kota Banda Aceh. Mahasiswa beragama Islam di Kota Makassar memiliki toleransi politik yang tinggi ketika masyarakat beretnis Cina-Indonesia menjadi guru di sekolah negeri dan pesantren. Pelajaran yang diajarkan tidak merubah toleransi politik mahasiswa, bahkan jika masyarakat beretnis Cina-Indonesia mengajar pelajaran Agama Islam di sekolah negeri.

Toleransi politik masyarakat berkembang berdasarkan lingkungan sosial, budaya, dan politik, yang diimplementasikan melalui pengetahuan terhadap kebebasan sipil. Tujuan mahasiswa mengamati kondisi lingkungan sekitar terlebih dahulu sebelum bersikap toleran terhadap kelompok minoritas adalah agar mahasiswa (sebagai bagian dari kelompok mayoritas) dapat menentukan kesejahteraan yang didapatkan jika bersikap toleran terhadap kelompok minoritas. Proses penerimaan kelompok minoritas tetap menetapkan batasan yang diterima oleh kelompok mayoritas, karena konsep ketidakterbatasan dalam sikap toleransi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (Lawrence, 1976).

Pada konteks negara Indonesia, masyarakat Indonesia membangun sikap toleran terhadap kelompok minoritas melalui interaksi agama, kondisi politik, serta proses perkembangan aspek sosial, agamis, dan ideologis. Indonesia adalah negara yang menekankan toleransi politik komunal, yakni mengimplementasi prinsip pluralisme legal dan *godly nationalism*. Pluralisme legal berfokus terhadap rekognisi hukum bagi kelompok minoritas, serta *godly nationalism* berfokus terhadap manajemen negara melalui agama dan kepercayaan. Kelompok minoritas perlu “mendapatkan” kedua prinsip tersebut, agar dapat diterima secara toleran oleh masyarakat mayoritas, yakni masyarakat Indonesia beragama Islam (Menchik, 2016).

Bagi kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia, mereka telah mendapatkan rekognisi dari Pemerintah Indonesia melalui prinsip pluralisme legal dan *godly nationalism*. Bukti riil dari rekognisi kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia oleh Pemerintah Indonesia adalah melalui Keputusan Presiden No. 6 Tahun 2000 Tentang Izin Kaum Minoritas Etnis Cina dalam Perayaan Hari-Hari Raya dan Tarian Naga di Tempat-Tempat Umum, yang disahkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Said, 2019). Presiden Gus Dur memberikan rekognisi terhadap kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia dengan penetapan agama Konguchu sebagai agama resmi di Indonesia. Rekognisi Pemerintah Indonesia terhadap kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia meningkatkan sikap toleran dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas.

Hasil rekognisi kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia terbukti dengan hasil penelitian ini. Hubungan *democratic values* dan toleransi politik yang positif menandakan bahwa mahasiswa yang memiliki *democratic values* yang tinggi bersikap toleran terhadap kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia. Alasan mahasiswa dapat bersikap toleran terhadap kelompok minoritas dapat dibagi atas lima macam, yakni (1) pendidikan, (2) tingkat intelektual tinggi, (3) peran mahasiswa, (4) usia, dan (5) globalisasi. Penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa individu dengan pendidikan tinggi memiliki tingkat toleransi yang tinggi (Peterson, 2020). Tingkat intelektual yang tinggi serta lima peran mahasiswa mendorong untuk dapat melakukan perubahan terhadap kondisi di dalam negara (Kurniawan, 2021). Penelitian terdahulu juga menemukan hasil bahwa individu dengan usia yang muda memiliki toleransi politik yang tinggi. Aspek globalisasi juga mendorong mahasiswa untuk dapat berikap terbuka dan dapat menghargai budaya multi-kultural.

Walaupun mahasiswa memiliki kelima macam nilai yang telah diimplementasikan dalam lingkup universitas, namun terdapat kemungkinan bahwa beberapa mahasiswa tidak ingin memperlihatkan sikap *prejudice* terhadap kelompok masyarakat beretnis Cina-

Indonesia. Asumsi peneliti terhadap mahasiswa yang tidak ingin memperlihatkan sikap *prejudice* ketika mengisi kuesioner adalah karena mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab untuk menghormati kehadiran dari kelompok minoritas. Penerimaan kelompok minoritas yang disebut sebagai *absence of prejudice* dilakukan agar mahasiswa dapat memberikan jawaban yang toleran, walaupun mahasiswa masih memiliki sikap *prejudice* terhadap kelompok minoritas (Brown-Iannuzzi, Najle, & Gervais, 2018).

Asumsi peneliti berlandaskan terhadap sejarah kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia yang selalu mengalami diskriminasi terhadap pemerintah dan warga Indonesia pada Orde Baru. Narasi kebencian terhadap kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia masih melekat hingga sekarang, dikarenakan relasi Pemerintah Indonesia dengan Republik Rakyat Cina yang menghasilkan sentimen negatif terhadap kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia. Walaupun hasil penelitian menghasilkan hubungan positif terhadap *democratic values* dan toleransi politik, namun asumsi tersebut patut diperhitungkan lebih lanjut jika terdapat peneliti yang ingin berfokus terhadap topik ini.

Hasil uji hipotesis menandakan bahwa penelitian memiliki hasil yang sama dengan penelitian Sullivan, Piereson, dan Marcus (1982). Penelitian tersebut mengemukakan bahwa individu dengan nilai demokratis yang tinggi memiliki toleransi yang tinggi terhadap kelompok minoritas. Hubungan nilai demokratis dengan toleransi politik terbentuk melalui aspek institusional dan historis untuk mengembangkan sikap demokratis dan toleran terhadap kelompok minoritas. Individu memperlihatkan sikap toleran jika kelompok minoritas menghargai nilai demokrasi di dalam negara. Prinsip *norm of reciprocity* berlaku ketika kelompok mayoritas dan minoritas saling menghargai nilai demokrasi, sehingga membentuk sikap toleran antar sesame (Petersen, dkk, 2011).

Hasil penelitian memiliki hasil yang berbeda dengan penelitian Saiful Mujani (2019), yang mengemukakan bahwa masyarakat Muslim Indonesia bersikap intoleran terhadap kelompok minoritas. Penelitian Saiful Mujani memberikan hasil bahwa masyarakat religius memiliki toleransi yang rendah terhadap kelompok minoritas. Pada pengaruh *democratic values* terhadap toleransi politik, variabel dapat meningkatkan toleransi agama, namun tidak dapat meningkatkan toleransi religio-politik. Saiful Mujani mengambil kesimpulan bahwa *democratic values* tidak memiliki hubungan signifikan terhadap toleransi politik. Jika melihat pada penelitian ini, terdapat dua perbedaan yang menghasilkan hasil penelitian kontradiktif di antara kedua penelitian. Perbedaan yang dimiliki oleh penelitian Saiful Mujani dengan penelitian ini adalah (1) penggunaan tiga macam toleransi sebagai variabel dependen, dan (2) fokus responden yang berbeda dari segi usia dan pengalaman. Kedua perbedaan penelitian mengisyaratkan dua hasil penelitian yang berbeda.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian dari variabel *democratic values* dan toleransi politik, kesimpulan penelitian adalah terdapat pengaruh *democratic values* terhadap toleransi politik. Berdasarkan hasil uji hipotesis, didapatkan hasil sebesar 30,714 dan nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa variabel *democratic values* memiliki hubungan positif terhadap toleransi politik. Presentase pengaruh *democratic values* terhadap toleransi politik adalah sebesar 23,9% berdasarkan Tabel *Model Summary*. Sisa nilai sebesar 76,1% adalah pengaruh variabel lain terhadap toleransi politik. Responden penelitian memiliki *democratic values* yang sangat bagus,

dengan nilai frekuensi sebesar 4,56. Responden memiliki tingkat toleransi politik terhadap kelompok masyarakat beretnis Cina-Indonesia yang bagus, dengan nilai frekuensi sebesar 3,73.

Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya mengenai toleransi politik, yakni (1) dapat diperbanyak lagi di Indonesia, karena peneliti hanya mendapatkan literatur dari Jeremy Menchik (2016) dan Saiful Mujain (2019), serta diharapkan dapat meneliti toleransi politik dalam mengembangkan literatur studi dalam konteks negara Indonesia; dan (2) disarankan untuk menjadikan kelompok minoritas lain sebagai objek penelitian dalam mengetahui tingkat toleransi politik dari masyarakat mayoritas (Islam) maupun antar sesama minoritas. Kelompok minoritas yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian adalah LGBT, beragama Buddha, beretnis Papua, ISIS, dan lain-lain.

Peneliti mengidentifikasi dua macam limitasi pada penelitian, yakni (1) hanya menggunakan tiga universitas sebagai populasi pada penelitian, dan (2) hanya menetapkan responden yang beragama Islam serta berpendidikan di jenjang universitas. Penelitian hanya menggunakan tiga universitas sebagai populasi, karena peneliti telah menetapkan populasi yang lebih besar dibandingkan dengan skripsi Angkasa Yudistira. Peneliti Angkasa Yudistira hanya menetapkan Fakultas Psikologi sebagai populasi penelitian, sehingga peneliti menetapkan tiga universitas agar populasi lebih mencakup besaran yang lebih luas. Limitasi kedua adalah penelitian hanya menetapkan responden yang beragama Islam serta berpendidikan di jenjang universitas, sehingga penelitian selanjutnya perlu mencakup responden yang memiliki agama selain Islam dan tidak berpendidikan di universitas agar hasil penelitian dapat mengetahui hubungan *democratic values* dan toleransi politik secara menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Boch, A. (2020). Increasing American Political Tolerance: A Framework Excluding Hate Speech. *Socius: Sociological Research for a Dynamic World*, 6, 1-12.
- Brown-Iannuzzi, J. L., Najle, M. B., & Gervais, W. M. (2018). The Illusion of Political Tolerance: Social Desirability and Self-Reported Voting. *Social Psychological and Personality Science*, 10(3), 364-373.
- Eisenstein, M. A., Clark, A. K., & Jelen, T. G. (2017). Political Tolerance and Religion: An Age Period-Cohort Analysis (1984-2014). *Review of Religious Research*, 59(3), 395-418.
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. *Jurnal Sospol*, 4(1), 132-148.
- Hjerm, M., Eger, M. A., Bohman, A., & Connolly, F. F. (2019). A New Approach to the Study of Tolerance: Conceptualizing and Measuring Acceptance, Respect, and Appreciation of Difference. *Social Indicators Research*, 10(3), 364-373.
- Irwan. (2018). Relevansi Paradigma Positivistik dalam Penelitian Sosiologi Pedesaan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 17(1), 21-38.
- Menchik, J. (2016). *Islam and Democracy in Indonesia: Tolerance without Liberalism*. Cambridge University Press.

- Menchik, J., & Pepinsky, T. (2018). Islam, Identity, and the Organizational Roots of Political Tolerance. *Social Science Research Network*, 1-30.
- Minoritas*. (t.thn.). Dipetik Desember 11, 2020, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/minoritas>
- Mujani, S. (2019). Explaining Religio-Political Tolerance among Muslims: Evidence from Indonesia. *Studi Islamika*, 26(2), 319-351.
- Noor, F. (2020, Mei 12). *Demokrasi Indonesia dan Arab Perkembangannya di Masa Pandemi COVID-19*. Dipetik Februrari 16, 2021, dari Pusat Penelitian Politik: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1394-demokrasi-indonesia-dan-arab-perkembangannya-di-masa-pandemi-covid-19>
- Novellno, A. (2019, November 3). *LSI: Intoleransi di Era Jokowi Masih Tinggi*. Dipetik Oktober 5, 2020, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191103183341-32-445250/lsi-intoleransi-di-era-jokowi-masih-tinggi>
- Peffley, M., Knigge, P., & Hurwitz, J. (2001). A Multiple Values Model of Political Tolerance. *Political Research Quarterly*, 54(2), 379-406.
- Petersen, M., Slothuus, R., Stubager, R., & Togeby, L. (2011). Freedom for All? The Strength and Limits of Political Tolerance. *British Journal of Political Science*, 41(3), 581-597.
- Priyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. (T. Chandra, Penyunt.) Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Solusi*, 18(2), 251-264.
- Rizaldi, R. (2021, Mei 31). *Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulawesi Selatan Menurun*. Dipetik Desember 5, 2021, dari LOGOV Celebes: <https://logovcelebes.id/infografis/item/114-indeks-demokrasi-indonesia-idi-sulawesi-selatan-menurun>
- Said, I. (2019). Hubungan Etnis Cina dengan Pribumi: Sebuah Tinjauan Sosiologis. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 1(2), 1-10.
- Santoso, G. (2007). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Siswoyo, D. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sullivan, J. L., Piereson, J., & Marcus, G. E. (1979). An Alternative Conceptualization of Political Tolerance: Illusory Increases 1950s-1970s. *The American Political Science Review*, 781-794.

Toleransi. (t.thn.). Dipetik November 24, 2020, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia: <https://kbbi.web.id/toleransi>

Yudistira, A. (2011). *Pengaruh Pelibatan Politik dan Sikap Tentang Demokrasi terhadap Toleransi Politik Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Jakarta*. Universitas Islam Negeri Jakarta.